

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta Bumi Aksara.
- Agustino. Leo, (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rhineka Cipta. Jakarta
- Baedhowi, (2004). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam bidang pendidikan*. Jakarta : Disertasi Departemen Ilmu Administrasi.Fisip Universitas Indonesia
- Depdiknas.(2001). *Desentralisasi Pendidikan*. Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djoehermansyah, D (2015), *Kado Hari Otonomi kompas*, 25 April 2015
- Dye, Thomas R. (2011). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall
- Edwards III, George C. dan Ira Sharkansky (1980), *Implementing public policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Eyestone, Robert. (1971) *The Thread of Policy; A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril.
- Fakry Gaffar.(1990). *Implikasi desentralisasi pendidikan menyongsong abad ke-21*. *Jurnal Mimbar Pendidikan*, 3, Tahun IX, Oktober.
- Fasli Jalal. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Friske, E.B, (1998). *Desentralisasi Pengajaran, politik dan consensus*. Jakarta: Penerbit P.T Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- H.AR.Tilaar, 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm.16
- Harun, (2015). *Pemprov Segera Kelola SMA/SMK*, [www. Kominfo. jatim](http://www.kominfo.jatim)

- Imron, Ali. (1995). *Kebijakan Pendidikan Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara
- Indrawan, Rullydan Poopy Yaniwaty, (2014). *Metodologi Penelitian; Kuantitatif, kualitatif, dan camuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*, Bandung: Refika Aditama.
- Jurnal Bina Praja, Abdul Malik, 2015. *Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementrian Dalam Negeri*. Jakarta, Vol 7 nomor 2.
- Miles, Matheww dan A. Michael Huberman, (1992), *Anilis Data Kualitatif; Buku Sumber tentang metode-metode Baru* (terj. Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta; Universitas Indonesia Pers
- Nakamura, Robert. T dan Frank Smallwood,(1980). *The Policics of Policy Implementation*, New York: St Martin Press.
- Nugroho, R. D. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Robert, E. (1971). *The Threads of Policy: A Study In Polycy Leadership*, Indianapolis: Bobbs Merrill.
- Rismaharini, (2015). *SMA dan SMK Batal dikelola Pemerintah Provinsi*. www.kompasiana.com
- Sugiyono, (201). *Memahami Penelitian Kualitatif; Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono, (2014) *Meotde Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Sudiyono.(2007). *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta.
- Solichin Mujianto, (2015). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi*, Jombang; vol 6, Nomor 2.
- Setyawan. H. B, (2015). *Dampak Negatif dan Positif SMA SMK Dikelola Provinsi*, [www, bogor-today.com](http://www.bogor-today.com)

- Supingi, I. (2017). Tata kelola SMA/SMK Meluas, www.pressreader.com
- Thaib, Dahlan dkk, (2006) , *Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT Ragagrafindo persada, Jakarta.
- Widodo, Joko.2001. *Analisis Kebijakan public konsep dan Alokasi Analisi Proses Kebijaksn public*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi.(2012). *Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta.
- Zuriah, Nurul. (2006). *Metode Penelitian Sosial dan Penedidikan Teori Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Permendikbud No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dibidang Pendidikan
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi PNS Daerah Provinsi